

Kemitraan Otentik Pendamping dalam Pemberdayaan Kelompok Perhutanan Sosial

Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
145-165

© The Author(s) 2024



Volume 21.2 Juli-Desember 2024
Publikasi *online*: 30 Desember 2024
<https://jisip.jurnaliisipjakarta.id>
Received: 14 November 2024
Revised: 10 Desember 2024
Accepted: 15 Desember 2024
DOI : 10.36451/jisip.v21i2.348

The Assistant Authentic Partnership in Empowering The Social Forestry Group

Sudarni¹ , Farisa Syafitri² , Nyala Candrika Tifani³ 

^{1,2,3} Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Indonesia

Corresponding Author:

Sudarini, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, IISIP Jakarta,
Jl. Raya Lenteng Agung No. 32, Jakarta Selatan, Jakarta, 12610, Indonesia.
E-mail: sudarini@iisip.ac.id

Abstrak

Pemberian izin perhutanan sosial kepada kelompok tani, tidak bisa secara instan bisa meningkatkan kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Mereka memiliki permasalahan, yaitu adanya keterbatasan tidak saja aspek keahlian tetapi pengorganisasian untuk mengolah dan mendayagunakan hasil hutan. Salah satu model yang dikembangkan ialah dengan melakukan pemberdayaan dengan pendampingan kepada kelompok tani. Artikel ini menjelaskan hasil penelitian tentang posisi dan peranan pendamping sosial dalam pemberdayaan kelompok tani kehutanan di desa Ibum. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus deskriptif. Pengumpulan data secara konvergen dilakukan dengan observasi, wawancara, dan menelaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pendamping telah melakukan proses pemberdayaan vertikal tipe ideal dengan mengikuti tahapan yang konsisten dan peranan horizontal yang simultan sebagai *enabler, broker, educator, expert, social planner, advocat, activist* yang mengindikasikan terjadinya kemitraan otentik. Untuk peningkatan keluaran yang spesifik dan konkret, penelitian *evaluative* yang akan datang perlu dilakukan berlandaskan kerangka teoritik dan kerangka pemikiran empiris berdasarkan pengalaman.

Kata Kunci

Pemberdayaan; Pendamping Sosial; Kemitraan; Komunitas Kehutanan

Abstract

The granting of social forestry license to the farmer group cannot instantly improve the lives of individuals and communities. They have the problem of limitations not only in terms of expertise but also organizing to process and utilize forest products. One of the models developed is the empowerment by assisting farmer groups. This article describes the results of research on the position and role of social assistants in empowering forestry farmer groups in Ibun village. The research was conducted using a qualitative approach and descriptive case study method. The Convergent data collection was carried out by the observation, interview and reviewing documentation. The results showed that the assistants had carried out the ideal type of the vertical empowerment process by following consistent stages, and simultaneous horizontal roles as the enabler, broker, educator, expert, social planner, advocate, activist which indicated the authentic partnership. For the improvement of specific and concrete output, the future evaluative research needs to be carried out based on theoretical frameworks and empirical frameworks based on experience.

Keywords

Community Forestry; Empowerment; Partnership; Social assistant

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia dan sumber mata pencaharian sebagian besar penduduknya sebagai petani. Kondisi tanah yang subur di Indonesia memungkinkan tumbuhnya keanekaragaman tumbuhan yang memiliki potensi untuk dijadikan aset dalam jangka panjang yang harus dijaga dan dilestarikan supaya dapat menjamin kesejahteraan kehidupan generasi pada masa yang akan datang.

Meskipun pertanian di Indonesia menjadi sektor ekonomi yang fundamental, sampai saat ini upah yang diterima para petani masih terbilang kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ditambah lagi jika petani tersebut masih mengandalkan penjualan hasil produksinya kepada tengkulak, maka pendapatannya akan semakin berkurang.

Kemiskinan masih menjadi isu utama kesejahteraan yang dihadapi oleh petani di Indonesia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 51,33% rumah tangga miskin di Indonesia berasal dari penduduk yang penghasilan utamanya pada sektor pertanian. Pada tahun 2023, BPS juga masih mencatat bahwa sebanyak 12,22% kemiskinan di pedesaan masih didominasi oleh perekonomian sektor pertanian. Hal tersebut memperlihatkan bahwa di tengah besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian negara tidak

diikuti dengan peningkatan kesejahteraan hidup petani di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, dari jumlah 25.863 desa yang berada di sekitar kawasan hutan, sebanyak 36,7% masuk dalam kategori miskin. Sementara itu, angka kemiskinan di Pulau Jawa mencapai 52% dari total penduduk miskin. Permasalahan lainnya juga terdapat desa yang tertinggal di dalam kawasan hutan seluas 7.236 hektar dan terdapat 472 ribu hektar lahan kritis di dalam kawasan hutan.

Salah satu desa yang berada di kawasan hutan ialah desa Ibum, Kecamatan Kamojang Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Masyarakat desa tersebut berada di kawasan hutan gunung Rakutak. Kawasan tersebut ditumbuhi tumbuhan kaso atau ilalang yang menancap ke bawah tanah hingga kedalaman 50 cm, sehingga apabila tumbuhan kaso tersebut tidak dibersihkan maka akan memperparah kebakaran hutan yang terjadi. Pertanian di Desa Ibum dan sekitarnya menjadi sulit dikembangkan karena kondisi hutan yang rusak cukup parah karena setiap tahun pada musim kemarau selalu terjadi kebakaran.

Pada tahun 1974, pemerintah mengeluarkan izin perhutanan sosial daerah Banten dan Jawa Barat seluas kl 1.888 ha. Untuk Jawa Barat izin diberikan kepada Kelompok Usaha Tani Mulya Tani, di Kecamatan Kamojang, Kabupaten Bandung meliputi 7 desa yang memiliki 32 kelompok, salah satunya ialah kelompok yang ada di Desa Ibum. Izin itu memberikan kesempatan masyarakat secara legal untuk mengelola hutan, sehingga merupakan pintu masuk dalam pemberdayaan masyarakat baik pada segi ekonomi maupun ekologis.

Dalam memanfaatkan izin tersebut, mereka masih menghadapi kesulitan dalam mengelola lahan tersebut, karena keterbatasan keahlian dan pengorganisasian serta pemasaran hasil usaha. Secara psikologis, mereka memiliki motivasi yang besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal ini menunjukkan tidak ada indikasi seperti pemikiran Mc Lelland bahwa ketidakberdayaan itu disebabkan kurang motivasi dan hasrat berpretasi dari masyarakatnya (Rusadi, 2014). Secara teoritis dalam kondisi psikologis demikian, proses pembangunan umumnya tidak sepenuhnya dilakukan secara linier melalui proses difusi inovasi, tetapi melakukan sinergi dengan model pembangunan partisipatif. Jika dalam model linier gagasan baru dirancang sepenuhnya dari luar sistem (masyarakat Desa Ibum), maka dengan melibatkan masyarakat terjadi proses sinergi nilai dari luar dan nilai dari masyarakat. Sebagai jembatan sinergi tersebut ialah melibatkan aktor luar pada seluruh proses pembangunan masyarakat, agar lebih berdaya. Dalam penelitian ini, yang terlibat ialah aktor organisasi, yaitu Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI), dengan melakukan proses pendampingan. Demikian juga pihak yang diberdayakan juga adalah individu yang tergabung dalam kelompok, Kelompok Tani Hutan.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 89 Tahun 2018, pengertian Kelompok Tani Hutan yaitu kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. Kelompok tani tersebut kemudian bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan ekonomi dan efisiensi usaha.

Kelompok Tani Hutan Mulya Tani adalah perkumpulan petani meliputi tujuh desa, yaitu Desa Ibum, Desa Neglasari, Desa Nagrak, Desa Dukuh, Desa Cikawao, Desa Sukarame, dan Desa Mandalahaji dengan 32 KUPS yang tersebar di kecamatan Ibum dan Pacet Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para petani bergabung dan bekerja sama dalam mengelola usaha di bidang kehutanan untuk meningkatkan ekonomi dan efisiensi usaha. Penelitian ini akan difokuskan di Desa Ibum, yang mendapatkan pendampingan untuk dilakukan pemberdayaan.

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan sehingga konsep pemberdayaan diartikan sebagai proses dan usaha menuju berdaya, atau kegiatan dari seseorang yang memiliki daya kepada pihak yang kurang berdaya (Mujaffar, 2020). Artinya, dalam aktivitas pemberdayaan terjadi pemberian daya (*power*) dari satu pihak ke pihak lain bisa individu atau kelompok. Pemberian daya itu dilakukan karena pihak lain dalam kondisi kurang berdaya atau tidak berdaya, karena berbagai hal (Laverack, 2006; Pigg, 2002).

Proses pemberdayaan menurut Maryani dan Nainggolan (2019) merupakan proses yang melibatkan masyarakat untuk merencanakan, menjalankan suatu program, serta memecahkan masalah secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan sumber daya pemberdayaan yang dimiliki. Menurut Suharto (2017), pemberdayaan masyarakat dari aspek tujuan yaitu rangkaian kegiatan dalam memperkuat kelompok yang lemah dalam masyarakat, baik individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan yang ingin dicapai yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial (Effendi, 2021).

Posisi masyarakat Desa Ibum memiliki ketidakberdayaan karena hambatan kondisi lingkungan hutan yang perlu dibuka yang memerlukan kemampuan teknis dan bantuan peralatan, kemampuan keahlian untuk bisa memanfaatkan hasil hutan menjadi barang atau makanan yang mempunyai nilai tambah. Permasalahannya ialah bagaimana proses pemberdayaan terjadi dan bagaimana peranan aktor pendamping dalam pemberdayaan tersebut.

Penelitian yang berkaitan dengan perhutanan ada beberapa kategori antara lain khusus penelitian secara umum manfaat perhutanan sosial, antara lain dilakukan Mulyana & Moeis (2022) dan Toha et al. (2023) yang memfokuskan pada keberadaan hutan sosial apakah memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian kategori lain ialah tentang pemberdayaan masyarakat di Indonesia antara lain pernah dilakukan oleh Apriliandra et al. (2022) dan Andari (2020), yang memfokuskan pada pemberdayaan oleh pekerja sosial terhadap objek komunitas perempuan yang rawan sosial ekonomi, dan pendampingan dalam layanan sosial. Keduanya menyimpulkan bahwa pemberdayaan cukup efektif, karena faktor kewenangan dan keahlian pekerja sosial. Kategori lebih spesifik dilakukan oleh Maryudi et al., (2012) yang melakukan evaluasi terhadap komunitas kehutanan. Hasilnya merekomendasikan tiga pendekatan berdasarkan tujuan yaitu, mengentaskan kemiskinan masyarakat pengguna hutan,

memberdayakan mereka dan memperbaiki kondisi hutan. Untuk di Indonesia direkomendasikan pendekatan yang lebih praktis ketimbang dengan indikator-indikator yang rumit. Masih tentang komunitas kehutanan, sebuah evaluasi komunitas kehutanan selama 25 tahun di Nepal, yang menilai komunitas kehutanan telah memberikan kontribusi yang efektif dalam mengatasi masalah lingkungan, sosial ekonomi dan politik. Penelitian itu mengungkapkan dua pembelajaran utama dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya hutan sosial, inklusi sosial, dan kontribusi terhadap demokratisasi. Pertama, kebijakan pengelolaan hutan berbasis komunitas kehutanan perlu berdasarkan pengalaman nyata dari bawah, dan kedua dalam memberikan otonomi kepada pengguna hutan, komunitas kehutanan dapat menjadi lembaga lokal yang bisa mempertahankan hutan dan demokrasi lokal serta memberikan pelayanan pembangunan pedesaan dan pembangunan kemitraan dengan LSM dan sektor swasta (Pokharel et al., 2007).

Penelitian lain membahas aspek keterlibatan masyarakat dalam pengembangan perhutanan sosial dilakukan oleh Purwadi et al., (2022) yang memberikan gambaran mengenai pendampingan kepada petani dalam pembibitan jenis tanaman tertentu yaitu pembibitan porang (*Amarphophallus onchophillus*). Termasuk kategori ini ialah penelitian pendampingan penanaman *agroforestry* kopi (Junaedi et al., 2022). Masih berkaitan dengan keterlibatan masyarakat, Roslinda et al., (2022) meneliti partisipasi masyarakat dalam program perhutanan sosial dengan menggunakan studi kasus di kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Fokus penelitian ialah menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan negara pada skema HKm. Partisipasi dinilai dari tiga tahap kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Penelitian yang dilaporkan dalam artikel ini mirip dengan penelitian Purwadi, Junaedi perbedaannya pendampingan yang dilakukan bukan semata aspek teknis bagaimana melakukan produksi tanaman hutan yang dipandang menguntungkan masyarakat tetapi lebih menyeluruh bagaimana masyarakat meningkatkan usaha yang bersumber dari perhutanan sosial sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Dari segi fokusnya lebih dekat dengan penelitian Rolinda, yang meneliti partisipasi masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perbedaannya ialah pada proses partisipasinya ialah melibatkan pendamping sebagai *community worker* yang menjadi aktor pembangunan.

Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses.

Menurut Suharto (2017), dalam menyelesaikan suatu permasalahan, masyarakat seringkali dihadapkan dengan kelompok yang tidak berdaya baik karena adanya hambatan internal yang

berasal dari dalam dirinya maupun adanya tekanan eksternal yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Untuk itu, pendamping sosial hadir sebagai agen perubahan yang terlibat dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Pendampingan sosial menjadi suatu strategi yang sangat menentukan akan keberhasilan dari sebuah program pemberdayaan masyarakat.

Dalam praktik menurut Adi (2012), secara umum tahapan pemberdayaan dilaksanakan melalui tujuh tahapan diawali oleh tahap-tahap persiapan. Tahapan ini terdapat dua tahapan yang harus dilakukan, pertama, menyiapkan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*. Kedua, mempersiapkan lapangan yang dilakukan secara non-direktif.

Tahap kedua, yaitu tahapan pengkajian (*assessment*). Proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, pendamping berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki penerima manfaat.

Tahap ketiga, merupakan tahap perancangan alternatif yaitu tahapan menyusun berbagai alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) mencoba melibatkan warga untuk berpikir terkait masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Masyarakat diharapkan dapat membuat beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

Setelah membuat alternatif kegiatan, maka tahap ke empat, menyusun atau memformalisasi Rencana Aksi. Pada tahapan ini pendamping membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan. Di samping itu, pendamping juga membantu untuk memformalisasikan ide masyarakat dalam bentuk tertulis, terutama apabila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pemilik dana.

Tahap lima ialah pelaksanaan yaitu tahap untuk pelaksanaan program keterlibatan masyarakat. Peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antara pendamping dan masyarakat sangat diperlukan dalam tahapan ini karena seringkali sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik pada pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan.

Setelah selesai dilakukan evaluasi sebagai tahap keenam. Evaluasi dijadikan sebagai proses pengawasan program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan serta dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan adanya keterlibatan warga, dalam jangka pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam sebuah perencanaan berkesinambungan, akhir suatu program merupakan awal dari tahap kegiatan lanjutan. Maka tahap ini disebut tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan kelompok sasaran. Dalam tahap ini diharapkan

proyek yang sudah berjalan tetap dilaksanakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Pendamping Sosial sebagai *Community Worker*

Tim pendamping ini menjadi salah satu faktor eksternal dalam pemberdayaan masyarakat. Peranan tim pendamping pada awal proses sangat aktif tetapi secara bertahap akan berkurang selama proses berjalan sampai masyarakat mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Peran tim pendamping sebagai fasilitator akan digantikan oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Menurut Suharto (2017), pendamping sosial adalah seseorang yang memiliki kemampuan melakukan proses pembelajaran masyarakat dalam konteks pemberdayaan, mereka datang untuk memfasilitasi, keberadaannya sejajar dengan masyarakat, serta berperan menemani masyarakat pada setiap tahapan proses pemberdayaan (Suhaimi, 2016).

Pendampingan sosial diartikan sebagai suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan penerima manfaat sebagai bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber serta potensi dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan akses penerima manfaat terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan pekerjaan, dan fasilitas pelayanan publik lainnya sebagai usaha dalam memecahkan masalah dan mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga terciptanya kemandirian klien secara berkelanjutan (Widodo, 2021).

Pendampingan juga dapat diartikan sebagai suatu interaksi yang terus-menerus antara pendamping dengan anggota kelompok atau masyarakat untuk menciptakan perubahan kreatif dengan bentuk tindakan yang dilakukan oleh anggota kelompok atau masyarakat yang sadar diri tanpa adanya intervensi dari luar sehingga dapat terwujudnya kemandirian kelompok masyarakat (Suhaimi, 2016).

Dalam penelitian ini, pendampingan sosial merupakan interaksi dinamis yang dilakukan Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial (AP2SI) dengan KPS Mulya Tani secara bersama-sama memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh para kelompok petani, menciptakan perubahan kreatif, dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sehingga terwujudnya kemandirian dalam masyarakat.

Seorang pendamping memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang memiliki kekuatan positif dan bermanfaat dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi. Pendamping membantu untuk menemukan sesuatu yang baik dan membantu klien dalam memanfaatkan hal tersebut. Seorang pendamping masyarakat bertugas untuk mendorong, menggerakkan, serta memotivasi masyarakat, sementara yang menjadi pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat.

Menurut Adi (2012), sekurang-kurangnya terdapat tujuh peran yang seringkali digunakan dan dikembangkan oleh *community worker* ketika sedang melakukan intervensi komunitas. *Pertama*, Pemercepat Perubahan (*Enabler*). Dasar filosofis dalam peran ini yaitu *help people to help themselves*. Seorang *community worker* membantu masyarakat dalam mengartikulasikan

kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalahnya, dan mengembangkan kapasitas masyarakat supaya mampu menangani masalah yang mereka hadapi dengan efektif. Empat fungsi utama yang dilakukan *community worker* dalam peranannya sebagai *enabler*, yaitu: membantu masyarakat untuk menyadari kondisi mereka, membangkitkan dan mengembangkan organisasi dalam masyarakat, mengembangkan relasi, dan memfasilitasi perencanaan yang efektif.

Kedua, Perantara (Broker). Peran seorang *broker* (perantara) dalam intervensi komunitas berkaitan erat dengan upaya untuk menghubungkan individu atau kelompok dalam suatu masyarakat yang membutuhkan bantuan maupun layanan masyarakat namun mereka tidak mengetahui dimana dan bagaimana cara mendapatkan bantuan tersebut dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat. Kemampuan yang dibutuhkan dalam pendampingan adalah mampu mengidentifikasi dan menempatkan sumber-sumber yang dibutuhkan, mampu menjadi penghubung antara penerima manfaat dengan sumber yang dibutuhkan dan mampu mengevaluasi efektivitas sumber.

Ketiga, Pendidik (Educator). Dalam kaitan perannya sebagai pendidik diharapkan seorang *community worker* memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi dengan baik, jelas, mudah dimengerti oleh penerima manfaat. Selain itu, seorang *community worker* harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait topik yang akan dibicarakan. Untuk itu, *community worker* juga harus menghubungi rekan dari profesi lain yang menguasai materi terkait dan seorang *community worker* harus selalu belajar supaya memiliki pandangan yang *up to date* dalam menjawab tantangan yang dihadapi. Seorang pendamping memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui bimbingan-bimbingan sebagai upaya dalam pencegahan, penyembuhan, penguatan, serta pengembangan sehingga penerima manfaat mampu untuk menghadapi permasalahan dalam mencapai keberfungsian social.

Keempat, sebagai tenaga ahli (Expert). *Community worker* diharapkan mampu memberikan masukan, saran, serta dukungan informasi terkait, selain itu juga harus menyadari bahwa usulan atau saran tersebut bukan hal yang mutlak harus dijalani oleh klien melainkan dijadikan sebagai masukan untuk pertimbangan klien dalam hal mengambil keputusan.

Kelima, Perencana Sosial (Social Planner). Dalam posisi ini, seorang perencana sosial berperan untuk mengumpulkan data terkait masalah sosial yang dihadapi komunitas yang kemudian dianalisis dan menyajikan alternatif tindakan rasional dalam menangani masalah tersebut. Dalam mengembangkan program, seorang perencana sosial mencari alternatif sumber pendanaan dan mengembangkan kesepakatan bersama dalam kelompok yang memiliki berbagai minat ataupun kepentingan. Peran sebagai perencana sosial dan peran *expert* saling tumpang tindih namun perencana sosial lebih terfokus pada tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan program.

Keenam, Advokat (Advocate). Peran advokat merupakan peran yang aktif dan terarah. Seorang *community worker* menjalankan fungsi advokasi yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan namun institusi tersebut tidak memperdulikan. Oleh karena itu, seringkali seorang *community worker* harus melakukan persuasi dengan kelompok profesional supaya dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Ketujuh, Aktivis (Activist).

Community worker sebagai aktivis mencoba melakukan perubahan yang mendukung dan bertujuan untuk pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung. Biasanya seorang aktivis memiliki perhatian terhadap isu-isu tertentu yang dialami oleh kelompok yang kurang beruntung seperti ketidaksesuaian hukum, kesenjangan sosial ekonomi, dan kasus perampasan hak.

Terdapat enam tujuan pemberdayaan Masyarakat, yaitu: (1) Perbaiki kelembagaan “*Better Institution*”. Dengan adanya perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha; (2) Perbaiki usaha “*Better Business*”. Perbaiki pendidikan “semangat belajar”, perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha; (3) Perbaiki pendapatan “*Better Income*”. Dengan adanya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, baik pendapatan keluarga maupun masyarakat; (4) Perbaiki lingkungan “*Better Environment*”. Adanya perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan baik fisik maupun sosial karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh faktor kemiskinan atau pendapatan yang terbatas; (5) Perbaiki kehidupan “*Better Living*”. Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan mampu memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat; (6) Perbaiki masyarakat “*Better Community*”. Kehidupan yang didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, diharapkan dapat terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera (Effendi, 2021).

Metode

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus dengan cara melakukan eksplorasi terhadap subyek penelitian sehingga diperoleh data atau informasi yang terkait dengan fenomena di lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang peran pendamping sosial dalam pemberdayaan kelompok perhutanan sosial (KPS) Mulya tani. Hasil pendekatan kualitatif akan menghasilkan data berupa pendapat, tanggapan informasi dan konsep untuk menjelaskan suatu masalah (Moleong, 2017).

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi serta data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Informan yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian yang terdiri dari informan utama (*internal*) yaitu pendamping sosial dan Informan *eksternal* anggota kelompok tani serta *expert*. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara.

Pengolahan data dimulai dengan melihat data yang telah dikumpulkan baik berupa catatan observasi maupun hasil wawancara serta dokumentasi, kemudian langkah selanjutnya adalah menyederhanakan data dengan melakukan seleksi, memilih yang penting dan yang akan dipelajari sesuai tujuan, menggolongkan untuk memfokuskan pada masalah yang diteliti. Kemudian, data disajikan dalam bentuk naratif untuk memudahkan dalam memahami data

tersebut. Penyajian data dilakukan dengan menampilkan data dilakukan dengan mendeskripsikan praktik yang dilakukan dalam proses pemberdayaan dan pendampingan dan dibandingkan dengan kriteria secara normative bagaimana pemberdayaan dan pendampingan seharusnya dilakukan. Dengan perbandingan tersebut bisa diketahui peran pendamping dan bagaimana hasil proses pendampingan yang dilakukan. Secara keseluruhan, temuan tersebut dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain yang sejenis, untuk mengetahui apakah proses pendampingan sudah berjalan sebagaimana seharusnya. Analisis tersebut diharapkan peran pendamping dalam melaksanakan pemberdayaan kelompok tani hutan bisa dirumuskan.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan kawasan perhutanan sosial di KPS Mulya Tani dibagi menjadi dua zona, yaitu zona perlindungan dan zona pemanfaatan. Zona perlindungan merupakan area yang tidak dapat ditanami karena terdapat mata air dan lahannya memiliki kemiringan sekitar 60 derajat. Sementara, zona pemanfaatan merupakan area yang digunakan petani untuk menanam tanaman seperti sayur-sayuran, buah-buahan, maupun tanaman tegakan. Komoditas utama KPS Mulya Tani adalah kopi, karena tanaman ini sesuai dengan kriteria aturan menanam dalam program perhutanan sosial dimana tanaman tersebut harus berdampak untuk aspek ekonomi maupun lingkungan.

Sebelum adanya program pemberdayaan dan pendampingan, para petani di Desa Ibum, Kamojang, menghadapi berbagai masalah. Mereka tidak memiliki kepastian mengenai lahan yang mereka tanami, dan setiap kali menanam di lahan tersebut, petani tetap harus membayar sewa, terlepas dari ada atau tidaknya pendapatan. Pada tahun 2012, lahan di hutan tempat para petani mencari nafkah ditutup oleh Perum Perhutani, sehingga para petani tidak dapat mengelola lahan tersebut, yang mengakibatkan tumbuhnya ilalang dan kaso yang memicu kebakaran hutan setiap tahunnya. Masalah lain yang dihadapi setelah para petani Desa Ibum, Kamojang adalah kurangnya pemahaman mereka mengenai budidaya yang sesuai dengan peraturan perhutanan sosial. Oleh karena itu, pada titik inilah kelompok petani memerlukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan Kelompok Tani

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui berbagai macam aktivitas yang direncanakan sehingga setiap individu dalam masyarakat memiliki kemampuan serta kekuatan untuk mengatasi dan memperbaiki situasi yang mereka hadapi. Kekuatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan proses yang tepat karena akan mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat.

Tahap tahap pemberdayaan yang dilaksanakan esensinya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan

Kriteria	Pelaksanaan
1 Persiapan Menyiapkan petugas dan lapangan	Petani mengajukan permohonan untuk pendampingan. Pendamping membentuk kelompok, pengumpulan dan validasi data sesuai dengan KTP dan KK, sosialisasi, program perhutanan sosial dan batas lahan.
2 Pengkajian Kajian individual dan melalui kelompok: identifikasi kebutuhan	Identifikasi karakteristik masyarakat, kebutuhan petani dilakukan dengan diskusi. Masalah: kesulitan air, ada hama yang mematikan tumbuhan, kesulitan membuka lahan karena kurangnya modal untuk membersihkan lahan dari ilalang. Akses yang sulit untuk mengangkut hasil panen dari lokasi lahan ke luar lokasi.
3 Perencanaan Alternatif Membuat alternatif program dalam mengatasi permasalahan melibatkan warga	Program alternatif: diversifikasi produk, mengolah bahan baku jadi bahan jadi, pelatihan digital marketing untuk yang sudah mempunyai produk
4 Formulasi Rencana aksi Pendamping membantu memformulasikan ide, program dan kegiatan yang akan dilakukan.	Formulasi rencana aksi pemberdayaan dalam bentuk tertulis, terutama untuk memperoleh dukungan pihak internal dan eksternal.
5 Pelaksanaan program Melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang melibatkan warga dan pendamping	Pelaksanaan menghadapi tantangan dampak El Nino, kondisi tanah berpasir, mempengaruhi produktivitas tanaman kopi berimplikasi meninjau kontrak dengan pembeli.
6 Tahap evaluasi Terjadi proses pengawasan yang melibatkan masyarakat	Dilakukan oleh pemerintah tiap tahun dan lima tahunan, oleh pendamping tiap enam bulan. Aspek yang dievaluasi ialah kesesuaian dengan rencana, perubahan yang terjadi. Jika tidak ada kesesuaian, pendamping menegur dan petani harus menjelaskan.

Sumber : Olahan Penulis

Pada tahap persiapan, AP2SI sebagai pendamping dalam kegiatan pemberdayaan KPS Mulya Tani melakukan beberapa langkah persiapan. Pertama, membentuk kelompok tani yang diberi nama KPS Mulya Tani. Selanjutnya, mengumpulkan data-data petani yang disesuaikan dengan data yang ada di KTP dan KK. Setelah proses pendataan selesai, langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi program perhutanan sosial dan melakukan penandaan batas lahan.

Pada tahap identifikasi masalah dilakukan secara individu maupun kelompok dengan melakukan identifikasi kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki. Tahap ini

dimulai dengan identifikasi karakteristik masyarakat lokal seperti kondisi sosial ekonomi Desa Ibum, masalah dan tantangan yang dihadapi petani. Pendamping melakukan pengamatan dengan mengunjungi kebun petani dan mengajak para petani berdiskusi memetakan permasalahan bersama-sama. Komunikasi yang baik dibangun sehingga pendamping dan petani dapat saling berbagi informasi, bertukar ide, dan mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Masalah yang dihadapi KPS Mulya Tani mencakup sulitnya akses air untuk kegiatan pertanian, serta adanya hama di lahan kebun sehingga mengakibatkan hilangnya akar tanaman dan membuat tumbuhan mati. Selain itu, petani juga mengalami kesulitan dalam membuka lahan karena memerlukan modal yang besar untuk membersihkan lahan dari ilalang dan tanah yang berpasir.

Pada perencanaan alternatif program atau kegiatan, masyarakat diharapkan dapat membuat beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Kegiatan diversifikasi produk dengan cara mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Program yang dapat dibuat meliputi pelatihan pengolahan produk dan pelatihan *digital marketing*. Faktor yang menjadi pertimbangan pembuatan program kegiatan ini yaitu terkait hasil produk yang dimiliki kelompok tani, diutamakan bagi kelompok tani yang sudah memiliki produk yang siap dipasarkan.

Perencanaan yang disusun kemudian diformalisasi dana rencana aksi. Dalam proses ini, KPS Mulya Tani melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif petani dan mengelola program secara efektif. Pihak-pihak eksternal merasa dilibatkan dalam program ini. Selain itu, terdapat kerja sama dengan lembaga lain, seperti KLHK, Walhi, dan Dana Nusantara, untuk mendukung keberhasilan program pemberdayaan tersebut.

Tahap pelaksanaannya dilakukan dengan kerja sama antar pendamping dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik pada pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik saat di lapangan. KPS Mulya Tani menghadapi tantangan serius akibat dampak El Nino serta kondisi lahan di Desa Ibum yang berpasir, sehingga memengaruhi kontrak kerja sama dengan pihak pembeli kopi. Sampai saat ini, belum ada perubahan rencana kegiatan, namun mereka melihat ada peluang untuk pengembangan di masa depan, seperti memanfaatkan lahan yang saat ini berada di wilayah perlindungan untuk pengembangan lebah madu.

Selanjutnya, dilakukan tahap evaluasi yang dilakukan sebagai proses pengawasan program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan serta dilakukan dengan melibatkan warga. Proses monitoring dan evaluasi dalam program perhutanan sosial ini dilakukan secara rutin setiap tahun sebelum menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan secara lebih mendalam dilakukannya setiap lima tahun. Kegiatan evaluasi dilakukan secara partisipatif melibatkan kelompok, pendamping, maupun pemerintah, dan pihak terkait lainnya melalui pertemuan, diskusi kelompok, dan wawancara. Aspek yang dipantau mencakup perubahan yang terjadi, kesesuaian dengan rencana kerja, hambatan tantangan, dan upaya-upaya perbaikan. Terdapat

pengisian kuisioner juga yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari program tersebut. Terdapat dua proses monitoring dan evaluasi dalam program pemberdayaan KPS Mulya Tani. *Pertama*, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah, yang berlangsung setiap tahun dan setiap lima tahun sekali, tergantung pada kondisi spesifik dari program tersebut. *Kedua*, proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pendamping setiap enam bulan sekali untuk memastikan tata kelola yang seimbang. Jika terdapat ketidaksesuaian maka pendamping akan memberikan teguran melalui surat pernyataan yang ditandatangani dengan materai. Petani juga harus memberikan alasan yang jelas jika tanaman yang tumbuh tidak sesuai dengan jumlah bibit yang ditanam.

Terakhir tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan kelompok sasaran. Tahap ini diharapkan proyek yang sudah berjalan tetap dilaksanakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Indikator penilaian untuk menentukan tahap terminasi suatu kelompok tani terdiri atas empat kelas, yaitu *Blue*, *Silver*, *Gold*, dan *Platinum*. Tahap *Blue* ketika kelompok petani baru mendapatkan SK Perhutanan Sosial dan potensi usaha sudah teridentifikasi. Tahap *Silver* apabila kelompok tani sudah memiliki RKPS dan unit usaha. Apabila mereka sudah memiliki produk dan menjual produk mereka pada tingkat pasar lokal maupun nasional itu sudah naik kelasnya menjadi *Gold*. Tahapan terakhir yaitu tahap *Platinum* ketika kelompok tani dinilai sudah mandiri karena telah mampu dalam melakukan kerja sama usaha, memasarkan produk hingga tingkat ekspor, dan tidak lagi memerlukan bantuan. Saat ini, KPS Mulya Tani baru menuju tahapan klasifikasi “Gold” dan belum mencapai tahapan “Platinum” yang menunjukkan kemandirian penuh. Apabila KPS Mulya Tani sudah mampu menjalankan kegiatan dan usahanya sendiri, serta petani dinilai sudah memiliki pengetahuan yang memadai dari aspek ekologis, maka pihak KLHK dan pendamping akan melakukan penilaian terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan terminasi program.

Peranan Pendamping Sosial

Dalam penelitian ini, Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) berperan sebagai pendamping yang membangun relasi dengan KPS Mulya Tani. AP2SI membantu petani di Desa Ibum untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui program perhutanan sosial, AP2SI memfasilitasi KPS Mulya Tani dalam memperoleh akses legal dan mengembangkan usaha pertanian, yang berdampak positif pada peningkatan pendapatan petani di Desa Ibum. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan dalam aspek sosial dan lingkungan. Dengan demikian, upaya pendampingan yang dilakukan AP2SI berkontribusi pada kemandirian petani di KPS Mulya Tani dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat petani, yang pada gilirannya berdampak positif pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Menurut Hendrawati Hamid (2018), meskipun masyarakat telah memiliki pengalaman dalam menjalankan kegiatannya, namun masyarakat masih membutuhkan bimbingan dalam

bekerja. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan yang dimiliki masyarakat berakar pada pengalaman sedangkan pendamping memiliki pengetahuan yang bersifat intelektual formal. Apabila keduanya berinteraksi secara aktif maka akan membawa suatu perubahan yang dinamis, sebagai upaya menciptakan kemandirian berdasarkan potensi yang dimiliki masyarakat dalam mewujudkan perubahan sosial.

Peranan pendamping sebagai *community worker* ketika sedang melakukan intervensi komunitas yang terjadi di Desa Ibum esensinya dapat dilihat pada tabel 2. Pendamping melakukan tujuh peranan untuk mempercepat perubahan. Peranan dimulai pada tahap pengkajian. AP2SI memberikan penyadaran dan memfasilitasi KPS Mulya Tani dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengadakan diskusi bersama petani untuk memetakan permasalahan. Pada tahap perencanaan alternatif program dan tahap pemformalisasi rencana aksi, peran pemercepat perubahan yang dilakukan oleh AP2SI yaitu membantu petani menuangkan ide-ide mereka dalam pembuatan program atau kegiatan yang akan disusun lebih lanjut di RKPS dan RKT. Ketika tahapan pelaksanaan pemberdayaan, peran AP2SI sebagai pemercepat perubahan dilakukan dengan memberikan motivasi kepada para anggota KPS Mulya Tani dan pada tahapan evaluasi, AP2SI memberikan masukan tentang kemajuan program pemberdayaan yang dapat digunakan untuk perbaikan. Pendamping memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan. Berdasarkan hal tersebut, perubahan yang ingin dicapai KPS Mulya Tani dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, yaitu meningkatkan hasil panen dan meningkatkan kualitas produk agar dikenal luas dan mendapatkan harga yang semakin baik, memperluas kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan mengembangkan usaha di bidang lain selain kopi.

Tabel 2. Peranan Pendamping dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Perhutaan Sosial

Kriteria	Pelaksanaan
<p>1</p> <p>Enabler</p> <p>Membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalahnya, dan mengembangkan kapasitas masyarakat supaya mampu menangani masalah yang mereka hadapi dengan efektif.</p>	<p>Membantu petani memetakan permasalahan dan menyusun RKPS dan RKT.</p>
<p>2</p> <p>Perantara (<i>Broker</i>)</p> <p>Mampu mengidentifikasi dan menempatkan sumber-sumber yang dibutuhkan, mampu menjadi penghubung antara penerima manfaat dengan sumber yang dibutuhkan, mampu mengevaluasi efektivitas sumber.</p>	<p>Pendamping menghubungkan KPS dengan Walhi dan Dana Nusantara membuat pelatihan pengelolaan lahan dengan tetap menjaga ekologi, memberikan bantuan modal untuk membangun rumah produksi dan membuat aliran air.</p>

3	<p>Edukasi</p> <p>Memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui bimbingan-bimbingan sebagai upaya dalam pencegahan, penyembuhan, penguatan, serta pengembangan sehingga penerima manfaat mampu untuk menghadapi permasalahan dalam mencapai keberfungsian sosial.</p>	<p>Melatih administrasi pendataan, cara menyusun program kegiatan dan mengajarkan ketrampilan.</p> <p>Upaya untuk meningkatkan pengetahuan atau informasi kepada petani dilakukan melalui diskusi serta pelatihan yang mencakup berbagai aspek, seperti budidaya, paska panen, dan pemasaran produk.</p>
4	<p>Tenaga Ahli (<i>Expert</i>)</p> <p>Mampu memberikan masukan, saran, serta dukungan informasi terkait</p>	<p>Saran terkait tatacara budidaya sesuai kondisi lahan, memberikan keterampilan dalam pengembangan usaha seperti <i>cupping</i> kopi, <i>roasting</i> kopi, sampai teknik pengemasan produk.</p>
5	<p>Perencana Sosial (<i>Social Planner</i>)</p> <p>Berperan untuk mengumpulkan data terkait masalah sosial yang dihadapi komunitas yang kemudian di analisis dan menyajikan alternatif tindakan rasional dalam menangani masalah</p>	<p>Peran sebagai perencana sosial lebih terfokus pada tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan program.</p>
6	<p>Advokasi</p> <p>Melakukan persuasi dengan kelompok professional supaya dapat mencapai tujuan yang diharapkan.</p>	<p>Melakukan pembelaan atas gugatan PT.RNI terkait Peraturan Perhutanan Sosial.</p> <p>Membela hak-hak petani, membantu mendampingi kelompok tani dalam pengusulan SK, serta memberikan pemahaman kepada petani tentang aturan-aturan hukum.</p>
7	<p>Aktivis</p> <p>melakukan perubahan yang mendukung dan bertujuan untuk pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung.</p>	<p>Sebagai aktivis berperan dalam menyuarakan hak-hak petani dan aspirasi kepada masyarakat luas.</p>

Sumber : Olahan Penulis

Peran pendamping sebagai perantara tidak hanya sekedar menghubungkan pihak-pihak terkait, tetapi juga berfungsi untuk memastikan keberhasilan kerja sama tersebut. Pendamping dapat membantu membangun kepercayaan antara petani dan pihak terkait, sehingga kerja sama yang terjalin dapat berlangsung lama dan saling menguntungkan. Pendamping menghubungi pihak-pihak terkait seperti Walhi dan Dana Nusantara. Kerja sama ini berfokus pada pelatihan agar petani dapat mengelola lahan dengan tetap menjaga ekologi, yang nantinya berdampak positif pada peningkatan nilai ekonomi masyarakat. Selain itu, adanya kerja sama ini juga mempermudah pelaksanaan program-program karena adanya bantuan modal untuk petani. Dengan dukungan tersebut, petani dapat membangun rumah produksi dan membuat akses aliran air, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian mereka

Sebagai pendidik, seorang pendamping memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan baik, jelas, mudah dimengerti oleh klien. Selain itu, seorang pendamping harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait topik yang akan dibicarakan dan seorang pendamping harus selalu belajar supaya memiliki pandangan yang *up to date* dalam menjawab tantangan yang dihadapi. Peran pendamping sebagai pendidik terlihat dalam beberapa tahapan pemberdayaan masyarakat pada KPS Mulya Tani. Beberapa tahapan tersebut, yaitu tahap persiapan. Pada tahapan ini, AP2SI memberikan pengetahuan terkait administrasi pendataan. Pada tahap pengkajian, AP2SI mengajarkan cara menghadapi permasalahan dengan memetakan masalah. Kemudian, pada tahap perencanaan alternatif program dan pemformalisasi rencana aksi, AP2SI memberikan pengetahuan terkait pembuatan dan penyusunan program kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan dalam mengatasi sebuah permasalahan. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, AP2SI memberikan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan petani. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan atau informasi kepada petani dapat dilakukan oleh pendamping melalui pemberian pemahaman serta praktik langsung. Upaya tersebut dilakukan melalui adanya pertemuan diskusi dan pelatihan keterampilan dengan memberikan pemahaman dan petani mempraktikannya langsung dalam aspek budidaya, manajemen pasca panen, dan administrasi terkait pencatatan transaksi. Pendamping berperan sebagai pendidik juga menjelaskan tata cara pengelolaan hutan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta memberikan pemahaman tentang budidaya dan praktik yang baik, seperti menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya. Selain itu, petani diajak untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, termasuk memahami pengelolaan sumber daya air dan praktik langsung terkait cara kerja alat proses produksi pertanian. Intensitas pertemuan petani dengan pendamping dalam proses pembelajaran umumnya dilakukan setiap dua bulan sekali. Namun, tetap ada jadwal yang fleksibel tergantung pada kebutuhan atau masalah apa yang dihadapi petani. Pendamping juga sering melakukan kerja sama dengan narasumber dari perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan LSM dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani.

Peran pendamping sebagai tenaga ahli berpengaruh dalam pengambilan keputusan berbagai tantangan yang dihadapi kelompok tani. Pendamping sering diminta untuk memberikan saran terkait masalah pertanian, menunjukkan bahwa mereka dianggap sebagai sumber pengetahuan dan solusi yang dapat diandalkan. Pada tahap pelaksanaan, AP2SI memberikan saran terkait pengelolaan lahan pertanian seperti tata cara budidaya yang sesuai dengan kondisi lahan di Desa Ibum bahwa tanaman tersebut harus memiliki daya ikat, daya rekat, dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman kopi. Selain terkait tata cara budidaya, AP2SI juga memberikan keterampilan dalam pengembangan usaha seperti *cupping* kopi, *roasting* kopi, sampai teknik pengemasan produk. Kemudian pada tahapan evaluasi, AP2SI memberikan saran berdasarkan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program. Pendamping tidak hanya berperan dalam aspek teknis pertanian, tetapi juga dalam pengembangan usaha petani, yang menjadikan pendamping sebagai tenaga ahli yang multifungsi dan berkontribusi signifikan

terhadap keberhasilan usahatani.

Seorang perencana sosial berperan untuk mengumpulkan data terkait masalah sosial yang dihadapi komunitas yang kemudian dianalisis dan menyajikan alternatif tindakan rasional dalam menangani masalah tersebut. Dalam mengembangkan program, seorang perencana sosial mencari alternatif sumber pendanaan dan mengembangkan kesepakatan bersama dalam kelompok yang memiliki berbagai minat ataupun kepentingan. Peran sebagai perencana sosial lebih terfokus pada tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan program. Peran pendamping sebagai perencana sosial memainkan peran penting dalam melibatkan petani secara aktif dalam pembuatan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat supaya dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Setelah rencana dijalankan, pendamping bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil kegiatan secara transparan dan sesuai dengan rencana yang telah disusun sehingga semua pihak dapat memahami dan dapat melakukan perbaikan bersama apabila terdapat kekurangan. Keterbukaan dan komunikasi yang baik antara pendamping dan petani menjadi kunci keberhasilan dalam peran pendamping sebagai perencana sosial.

Peran pendamping sebagai advokat dapat dilakukan dengan membela hak-hak petani, membantu mendampingi kelompok tani dalam pengusulan SK, serta memberikan pemahaman kepada petani tentang aturan-aturan hukum. AP2SI sebagai pendamping melakukan pembelaan baik atas nama kelompok maupun individu. AP2SI berperan sebagai advokat dalam tahap pelaksanaan pemberdayaan. AP2SI melakukan advokasi membela hak-hak petani. Menurut informan internal, pembelaan tersebut dilakukan terkait Peraturan Perhutanan Sosial yang digugat oleh PT RNI, yang dapat berdampak pada perizinan pengelolaan lahan yang digarap petani. Pembelaan atas nama individu juga dilakukan ketika adanya konflik lahan di antara anggota kelompok petani. AP2SI sebagai pendamping pernah melakukan pembelaan baik atas nama kelompok maupun individu. Pendamping terlibat dalam peran advokasi pembelaan hak-hak kelompok tani terkait Peraturan Perhutanan Sosial yang digugat oleh PT RNI. Pembelaan atas nama individu juga dilakukan ketika adanya konflik lahan di antara anggota kelompok petani.

Pendamping sebagai aktivis berperan dalam menyuarakan hak-hak petani kepada masyarakat luas. Pendamping menyampaikan aspirasi petani melalui demonstrasi bersama para petani untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak tani. Pendamping juga berperan dalam membangun dukungan dan mobilisasi pihak-pihak lain, baik internal maupun eksternal, untuk terlibat dalam aktivitas atau gerakan mengatasi permasalahan kelompok. Pendamping menggunakan berbagai metode, seperti pertemuan langsung, mengirim surat, dan diskusi, untuk menjelaskan kebutuhan serta pentingnya keterlibatan pihak terkait menyelesaikan konflik dan masalah yang dihadapi petani. Pendamping berfungsi sebagai penghubung antara petani dan pembuat regulasi agar suara petani didengar dan hak-hak mereka terpenuhi.

Hasil Pemberdayaan

Melalui proses pendampingan, Kelompok Usaha Tani di Desa Ibun tampak mengalami

perubahan ke arah lebih baik meliputi aspek-aspek kelembagaan, usaha, pendapatan, peningkatan kualitas kehidupan, dan kesejahteraan petani. Aspek kelembagaan tampak setelah pendampingan organisasi menjadi lebih terstruktur, terarah, dan memiliki perencanaan serta wilayah kelola yang jelas. Keanggotaan juga menjadi lebih teratur dengan pendataan yang sesuai dengan NIK dan masyarakat menunjukkan tingkat disiplin yang lebih tinggi. Desa Ibum mendapat bantuan dalam kegiatan program *Integrated Area Development (IAD)* yang merupakan kolaborasi antara Ditjen PSKL dan Pemerintah Daerah Bandung untuk mendukung pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial, dengan berbagai bantuan dari kementerian seperti pupuk subsidi, bibit, dan pelatihan budidaya. Masyarakat memiliki kedisiplinan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan organisasi terkait tatakelola lahan.

Dari aspek usaha, terlihat indikator menunjukkan kondisi lebih baik. Pengembangan usaha berupa pengembangan teknik budidaya, teknik pengelolaan produksi, perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan bisnis pengembangan jejaring kemitraan usaha, dan terbukanya peluang untuk memperoleh akses ke sumber dana.

Dengan adanya perbaikan usaha yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, baik pendapatan keluarga maupun masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, dengan pemberdayaan masyarakat terjadi perubahan pada aspek pendapatan, yaitu pendapatan petani meningkat dengan adanya pelatihan dan bantuan akses modal. Perubahan pada aspek lingkungan, seperti meningkatnya kesadaran petani akan pentingnya keberlanjutan. Praktik budidaya yang diterapkan menjadi lebih ramah lingkungan, seperti penanaman kopi yang kuat dan tahan lama, serta adanya pengurangan kebakaran hutan dan banjir, sehingga kualitas udara menjadi lebih bersih. Perbaikan usaha tersebut sekaligus meningkatkan kehidupan pribadi yang memungkinkan mereka memiliki rumah dan kendaraan yang memudahkan kegiatan sehari-hari. Secara keseluruhan berdampak pada kehidupan masyarakat lebih baik.

Relasi Pendampingan, Pemberdayaan, dan Kinerja

Program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Ibum menunjukkan kinerja yang positif secara signifikan sudah mampu meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan usaha pertanian dengan lebih baik. Selain adanya peningkatan pada aspek ekonomi, petani juga mengalami peningkatan kualitas hidup pada aspek lingkungan dan lembaga.

Dengan melihat tujuan pemberdayaan dan upaya yang dilakukannya, walaupun fokusnya pada komunitas masyarakat kehutanan sosial, tetapi aspek yang dicakup menyeluruh dalam rangka mengatasi kemiskinan. Artinya, telah menggunakan pemberdayaan sebagai strategi dalam mengatasi kemiskinan secara optimal. Kloee Titu Eki et al. (2024) menjelaskan perspektif kekuatan sangat diperlukan dalam sebuah pemberdayaan program. Pendekatan berbasis kekuatan bukan untuk menggantikan teori lain yang telah digunakan waktu yang lama, dalam menyusun dan menganalisis, kebijakan sosial atau program pemberdayaan komunitas masyarakat komunitas. Artinya program pemberdayaan dianggap sesuai dalam mengentaskan

kemiskinan di desa Ibum. Kata kunci pemberdayaan ialah mengubah seseorang lebih berdaya, dalam arti memiliki kekuatan, yang biasa dilihat dari dimensi psikologis. Menurut Perkins & Zimmerman (1995) teori pemberdayaan psikologis dengan diikuti oleh intervensi berbasis komunitas merupakan pilihan tepat. Proses itulah yang terjadi di Desa Ibum. Pemberdayaan sudah mencakup tiga wajah sebagaimana dikemukakan Pigg (2002), yaitu pemberdayaan tiga dimensi: pemberdayaan diri melalui tindakan individu, pemberdayaan bersama yang bersifat interpersonal, dan pemberdayaan sosial dalam hasil tindakan sosial, ketiga dimensi tersebut dijalankan di Desa Ibum secara simultan.

Bagaimana pemberdayaan dilakukan sehingga targetnya bisa lebih berdaya, cara yang ditempuh di Desa Ibum dengan melibatkan pendamping sebagai *community worker* dari Asosiasi Perhutanan Sosial. Dari proses pemberdayaan, terlihat posisi pendamping merupakan posisi yang signifikan, karena mereka telah bekerja penuh secara menyeluruh vertikal dan horizontal. Vertikal menyangkut aspek proses pemberdayaan meliputi tujuh aspek mulai dari persiapan sampai terminasi. Secara horizontal, pendamping telah melakukan secara simultan peranan sebagai *enabler, broker, edukator, expert, social planner, advocat, activist*.

Dari keseluruhan proses pendampingan, baik vertikal dan maupun horizontal dapat disimpulkan pendampingan dilakukan dengan kemitraan kolaboratif dengan fondasi rasa saling menghargai, hubungan yang sinergis, dan fokus pada proses, bukan hanya pada hasil. Proses demikian menurut Harriss dan Fowler (2000) dalam Vasconcellos & Vasconcellos (2009) merupakan jenis kemitraan 'tipe ideal dari ideal', pendampingan dengan 'kemitraan otentik', yaitu kemitraan yang didasarkan pada kepercayaan dipahami sebagai hasil dari kemampuan berjejaring dan keterlibatan para aktor secara penuh.

Temuan hasil pemberdayaan tersebut masih bersifat umum atau *generic* belum mengungkapkan bukti bukti empiris yang bisa divalidasi, merupakan keterbatasan penelitian ini. Dalam kaitan ini, Joseph (2020) menyarankan sebaiknya evaluasi proses pemberdayaan dilakukan dengan model kombinasi pengukuran Skala Evaluasi Teori (TES), dengan model tradisional yang mengungkapkan bukti hasil terapis pemberdayaan sosial. Dalam konteks penelitian agar bisa merekomendasikan peningkatan performa pendampingan dalam proses pemberdayaan yang lebih konkret. Penelitian yang akan datang perlu dilakukan dengan berbasis kerangka teoritis yang kuat tetapi juga mengacu pada kerangka empiris dari berbagai praktik pemberdayaan.

Simpulan

Pemberdayaan kelompok tani hutan yang dilaksanakan dengan mengikuti tahap-tahap pemberdayaan telah menunjukkan hasil, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pendamping sosial telah melakukan peranan secara vertikal dengan patuh dan konsisten mengikuti aturan pemerintah guna mendukung proses berkelanjutan program ini perlu didukung oleh adanya keberlanjutan ekologis, ekonomis, dan sosial yang saling terkait dan

berjalan secara selaras agar keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat hutan tidak hanya menjadi sebuah khayalan saja. Dalam mencapai keberhasilan, masih diperlukan peningkatan kerja sama dengan pihak terkait, baik itu pemerintah maupun lembaga atau organisasi industri. Memperluas pemasaran kemasan kopi embun rakutak hasil produksi KPS Mulya Tani kerja sama dengan industri dan UMKM perlu ditingkatkan agar kopi semakin dikenal masyarakat.

Temuan tersebut masih didasarkan laporan diri informan, belum didukung bukti-bukti empiris yang kuat dan terukur, dianggap sebagai keterbatasan penelitian ini. Sebagaimana penelitian evaluatif yang lebih signifikan, kiranya perlu dilakukan penelitian evaluatif tidak saja berbasis model teoritik tetapi juga model empiris berdasarkan pengalaman pelaku pemberdayaan dan pendampingan, sehingga rekomendasi dapat diajukan yang lebih konkret dan spesifik.

ORCID ID

Sudarini  <https://orcid.org/0009-0006-6234-8063>

Farisa Syafitri  <https://orcid.org/0009-0006-4314-9667>

Nyala Candrika Tifani  <https://orcid.org/0009-0006-9118-5857>

Daftar Pustaka

- Adi, I. R. (2012). *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2200>
- Apriliandra, S., Suwandi, A. A., & Darwis, R. S. (2022). PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEREMPUAN RAWAN SOSIAL DAN EKONOMI. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 27–39.
- Effendi, I. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Suluh Media. Suluh media.
- Hendrawati Hamid. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar : De La Macca. De La Macca.
- Joseph, R. (2020). The theory of empowerment: A critical analysis with the theory evaluation scale. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 30(2). <https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1660294>
- Junaedi, J., Kadir, M., Thamrin, S., & Mu'minah, M. (2022). Pendampingan kelompok tani hutan dalam menunjang agroforestri kopi. *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan*, 3. <https://doi.org/10.51978/proppnp.v3i1.307>
- Kloee Titu Eki, A., Ngadilah, C., & Eky, Y. E. (2024). Empowerment Poor Communities with the Strengths - Perspective in Empowerment Theory. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i2.1066>
- Laverack, G. (2006). *Improving health outcomes through community empowerment: A review of the literature*. <https://www.researchgate.net/publication/6988708>

- Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanyi, C., Salla, M., Aurenhammer, H., Rotchanaphatharawit, R., & Krott, M. (2012). Back to basics: Considerations in evaluating the outcomes of community forestry. In *Forest Policy and Economics* (Vol. 14, Issue 1, pp. 1–5). <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.07.017>
- Mujaffar, A. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan*. Forum Pemuda Aswaja.
- Mulyana, M., & Moeis, J. P. (2022). *Dampak program perhutanan sosial terhadap pertumbuhan usaha dan deforestasi: bukti empiris dari Indonesia* (Vol. 11, Issue 1).
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5). <https://doi.org/10.1007/BF02506982>
- Pigg, K. E. (2002). Three Faces of Empowerment: Expanding the Theory of Empowerment in Community Development. *Journal of the Community Development Society*, 33(1), 107–123. <https://doi.org/10.1080/15575330209490145>
- Pokharel, B. K., Branney, P., Nurse, M., & Malla, Y. B. (2007). Community Forestry: Conserving Forests, Sustaining Livelihoods and Strengthening Democracy. In *Journal of Forest and Livelihood* (Vol. 6, Issue 2).
- Purwadi, Sasongko, P. E., & Hidayat, R. (2022). Pendampingan kelompok tani hutan Desa Panglungan dalam pembibitan porang (*Amarphophallus onchophillus* Prain). *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 8(2).
- Roslinda, E., Rianti, R., & Ershintia, H. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Program Perhutanan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 16(2). <https://doi.org/10.22146/jik.v16i2.2540>
- Rusadi, U. (2014). *Makna dan Model Komunikasi Pembangunan*. Jurnal Studi Komunikasi dan media, 18 : 1
- Suhaimi, A. (2016). *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Yogyakarta: Deepublish*. Deepublish.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama. Refika Aditama.
- Toha, M., Wihadanto, A., & Nurhasanah, N. (2023). Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di kota Tarakan. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 7(2), 133. <https://doi.org/10.32522/ujht.v7i2.10302>
- Vasconcellos, M., & Vasconcellos, A. M. (n.d.). *Partnership, empowerment and local development*.
- Widodo, S. (2021). *Metode dan Teknik Pekerjaan Sosial Dalam Penanganan Masalah Klien*. Yogyakarta: Deepublish. Deepublish.